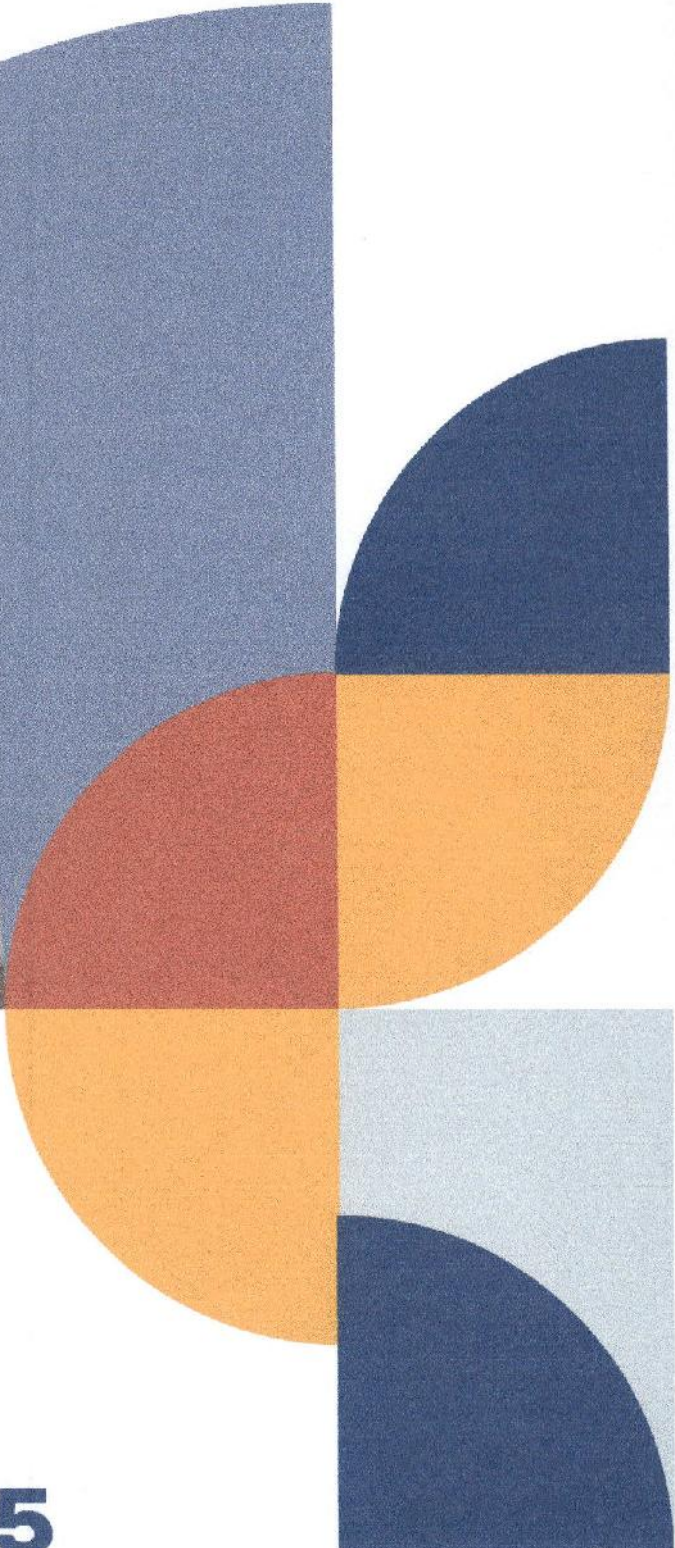
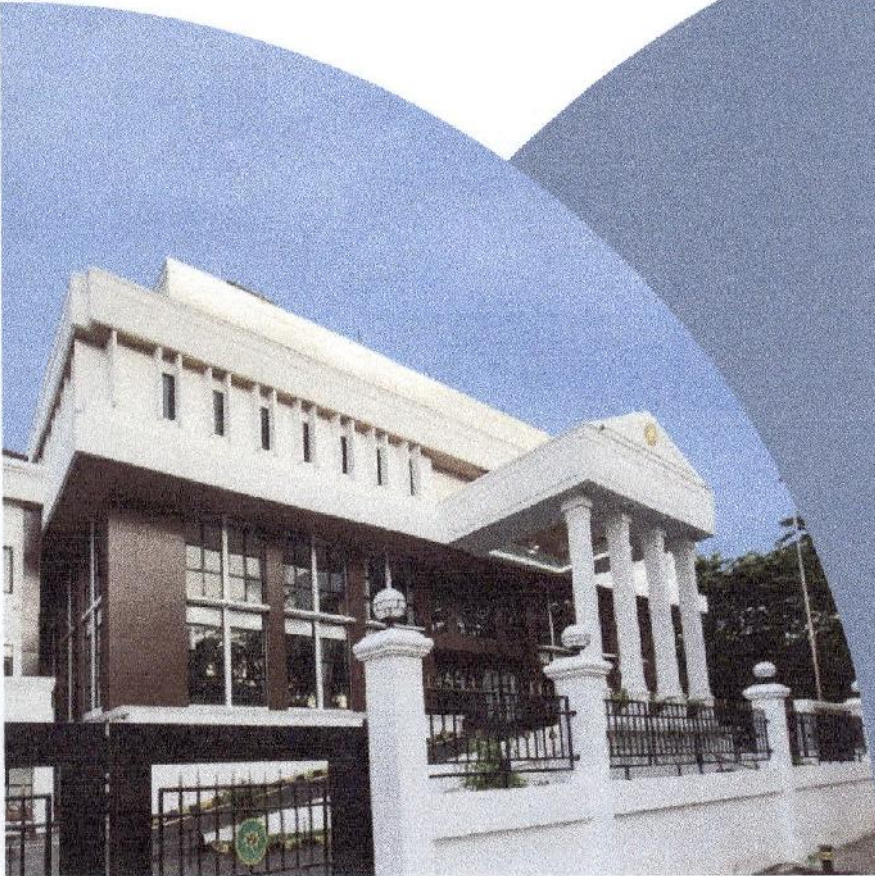




PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



LAPORAN BULANAN BULAN MEI 2025

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Contact Us
(021) 22859672

More Information
www.ptun-jakarta.go.id

Our Office
**Jl. A. Sentra Primer Baru Timur,
Pulo Gebang, Jakarta Timur. 13950**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	15
BAB III. TELAAHAN	23
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	24

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprasi di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



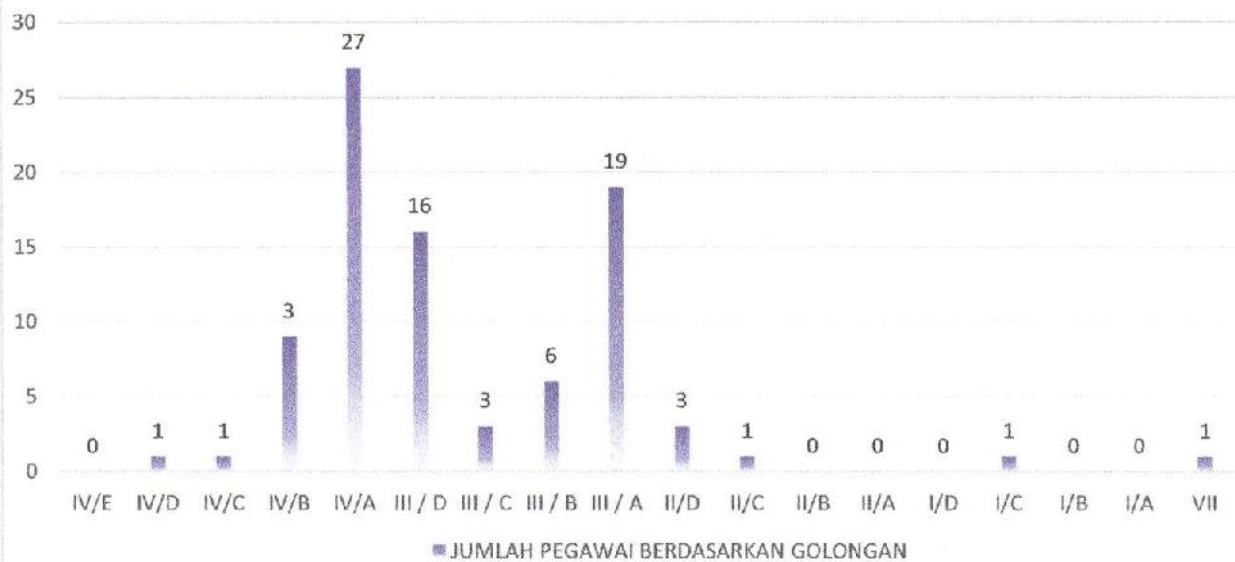
- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 31 Mei 2025 adalah 87 Orang, 1 Orang PPPK (P3K) dan PPNPN berjumlah 11 Orang, yang terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 62 orang dan Perempuan 37 Orang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

Mutasi Keluar Wilayah

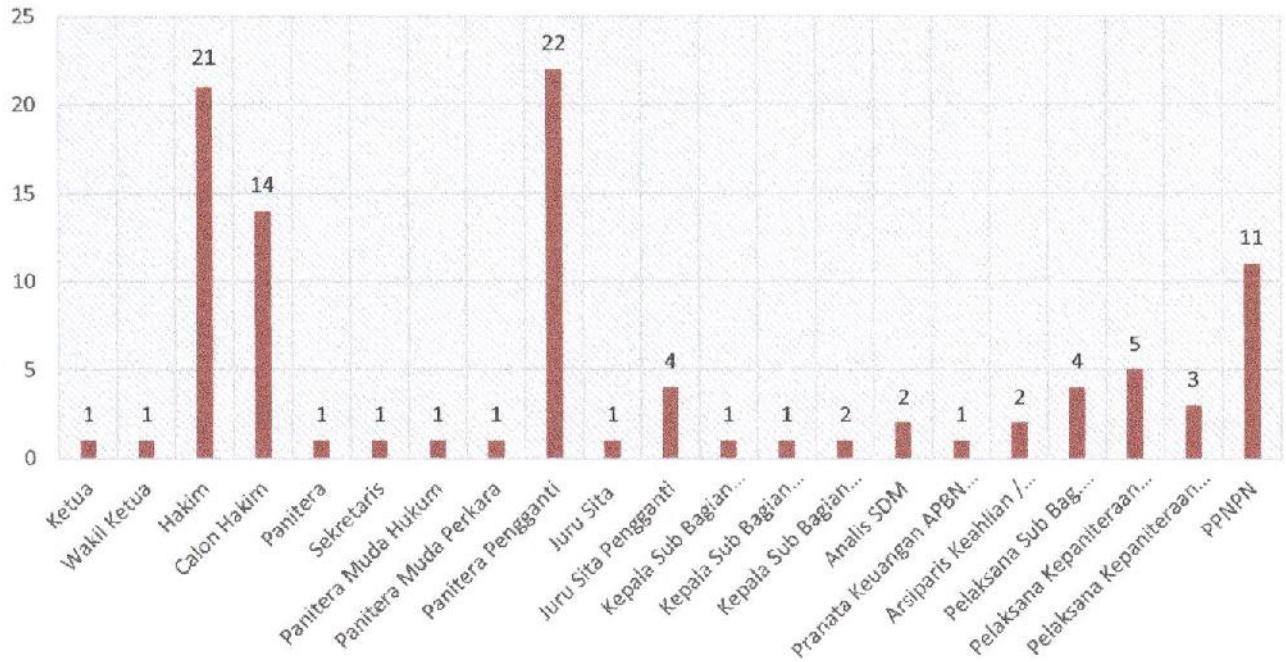
NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

Pelantikan / Pengangkatan Jabatan Baru :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Rio Pranata, SH	CPNS Analis Perkara Peradilan	PNS Analis Perkara Peradilan	TMT 02 Mei 2025
2.	Mida Asmo Arum, SH	CPNS Analis Perkara Peradilan	PNS Analis Perkara Peradilan	TMT 02 Mei 2025

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub.Bag.Kepegawaian dan Ortala	67	0	0	67
2	Sub.Bag.Umum dan Keuangan	20	0	0	20
3	Sub.Perencanaan, TI,dan Pelaporan	5	0	0	5
4	Kepaniteraan Muda Perkara	159	0	0	159
5	Kepaniteraan Muda hukum	12	0	0	12
6	Lain-lain	0	0	0	0
TOTAL					263

Surat Masuk

NO	SUB. BAGIAN	SURAT MASUK				JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING	RAHASIA	
1		MAHKAMAH AGUNG RI	0	13	1	14
2		PT. TUN-Jakarta	0	0	0	0
3		BALIT BANG DIKLAT KUMDIL	2	0	0	2
4	PERSURATAN	DIRJEND. BADIMIL TUN	2	0	0	2
5		KOMISIYUDISIAL	0	0	0	0
6		PERKARA/LAIN-LAIN	83	0	0	83
7		UMUM/LAIN-LAIN	22	0	0	22
TOTAL						123

2) Tata Kearsipan :

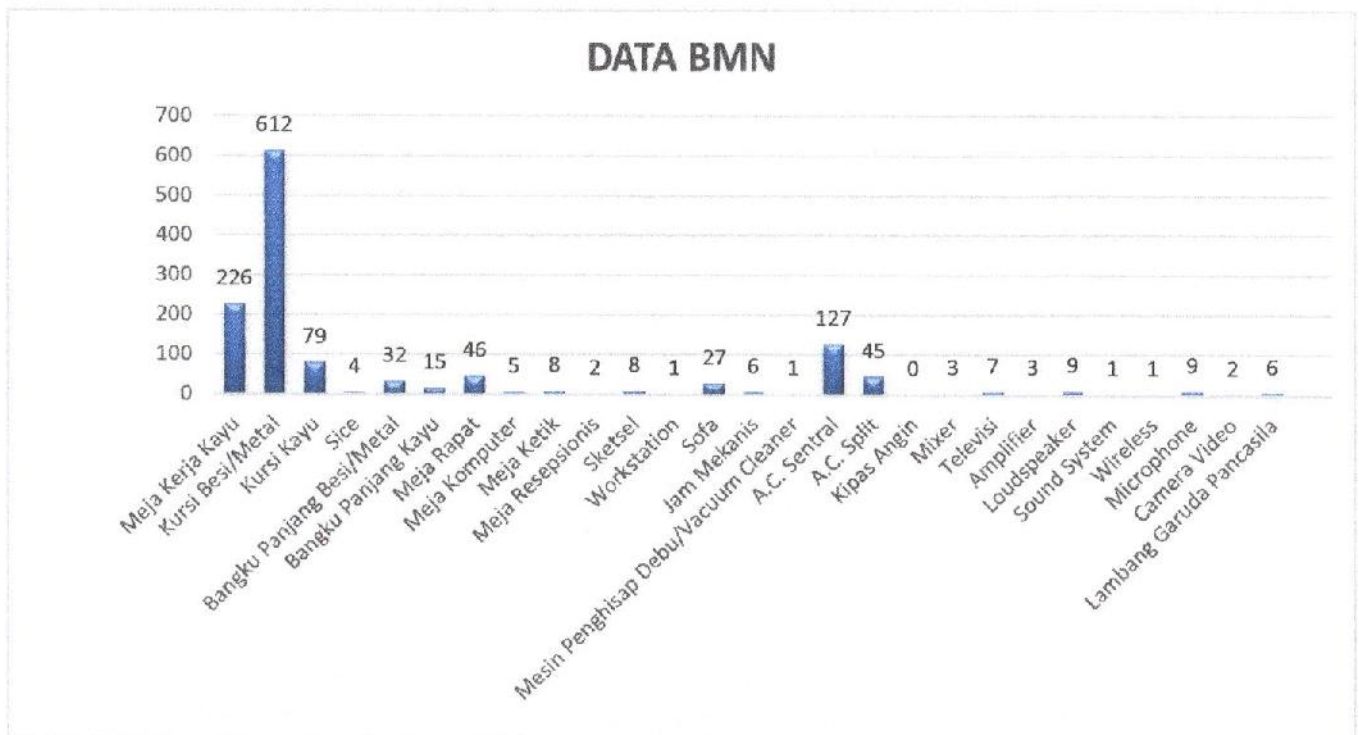
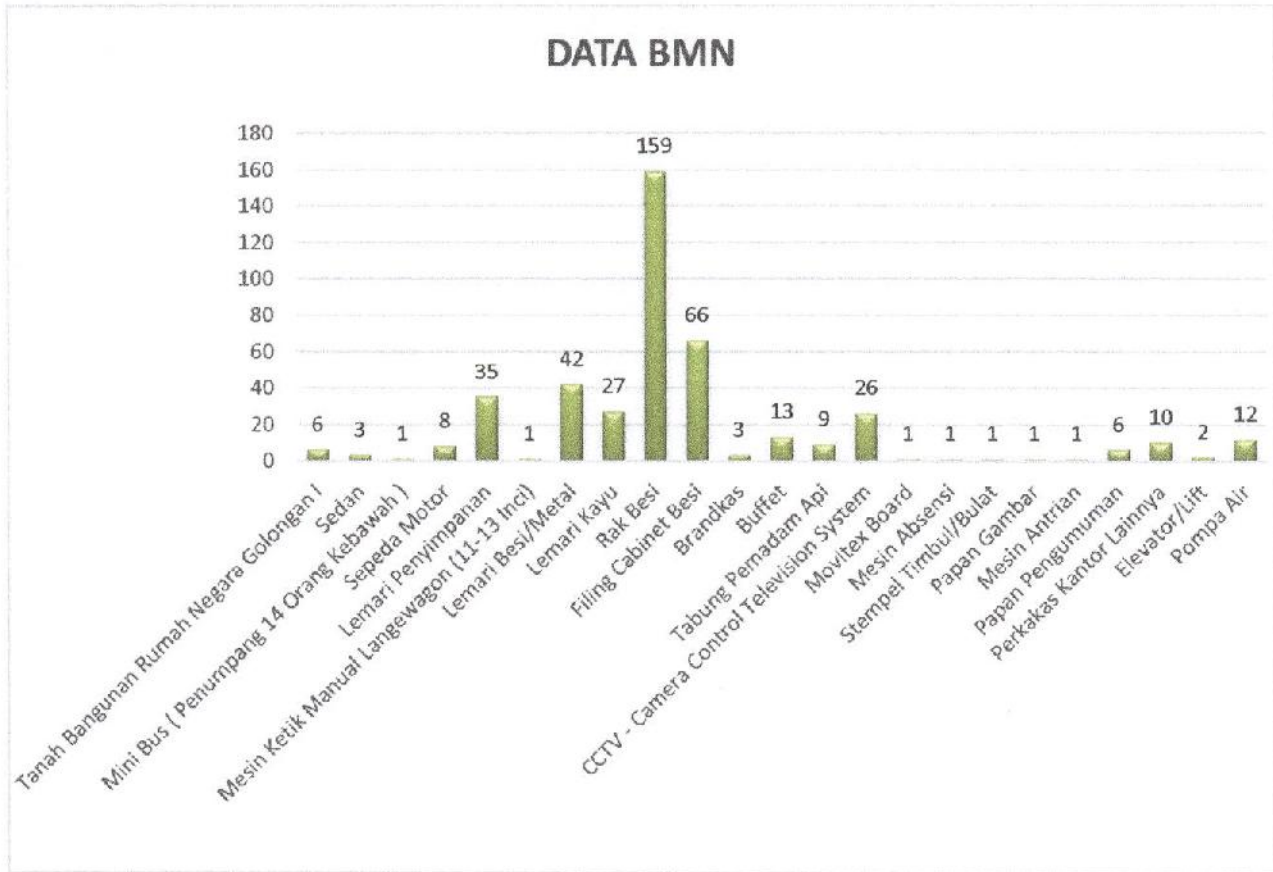
Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171 /PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.

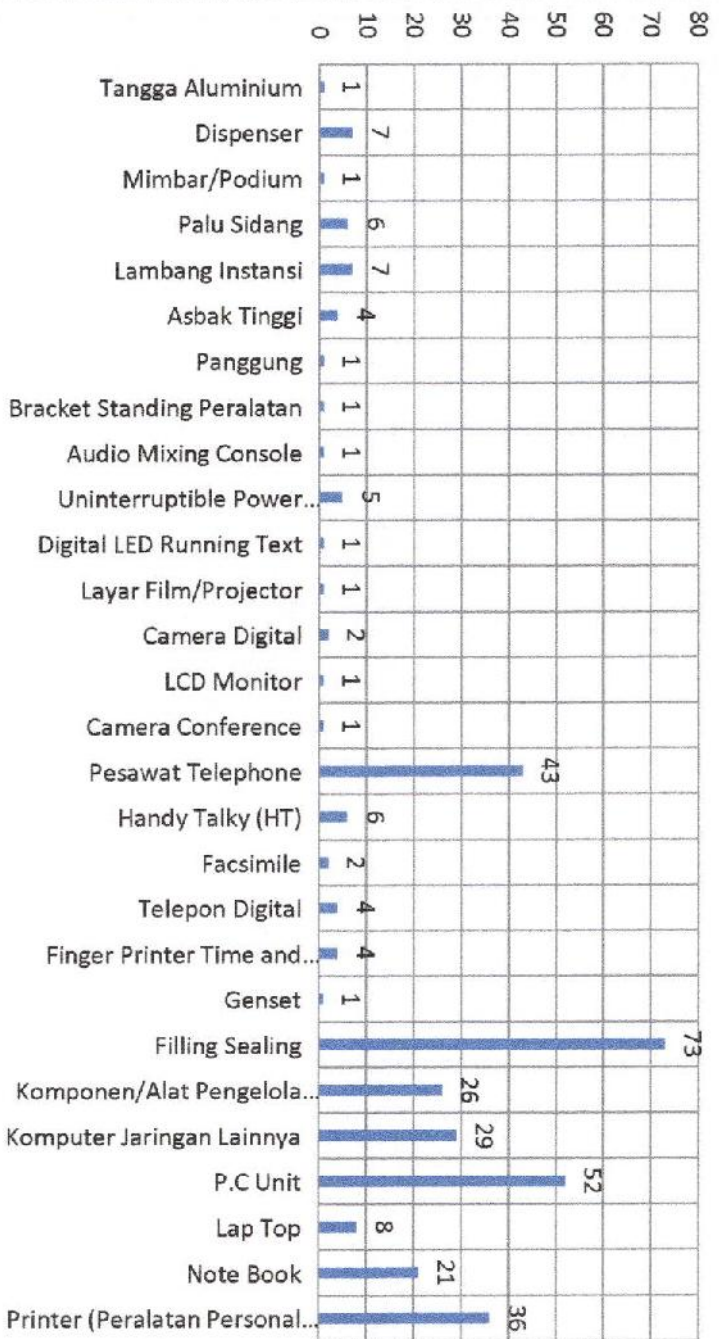
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Untuk bulan Mei Tahun 2025 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

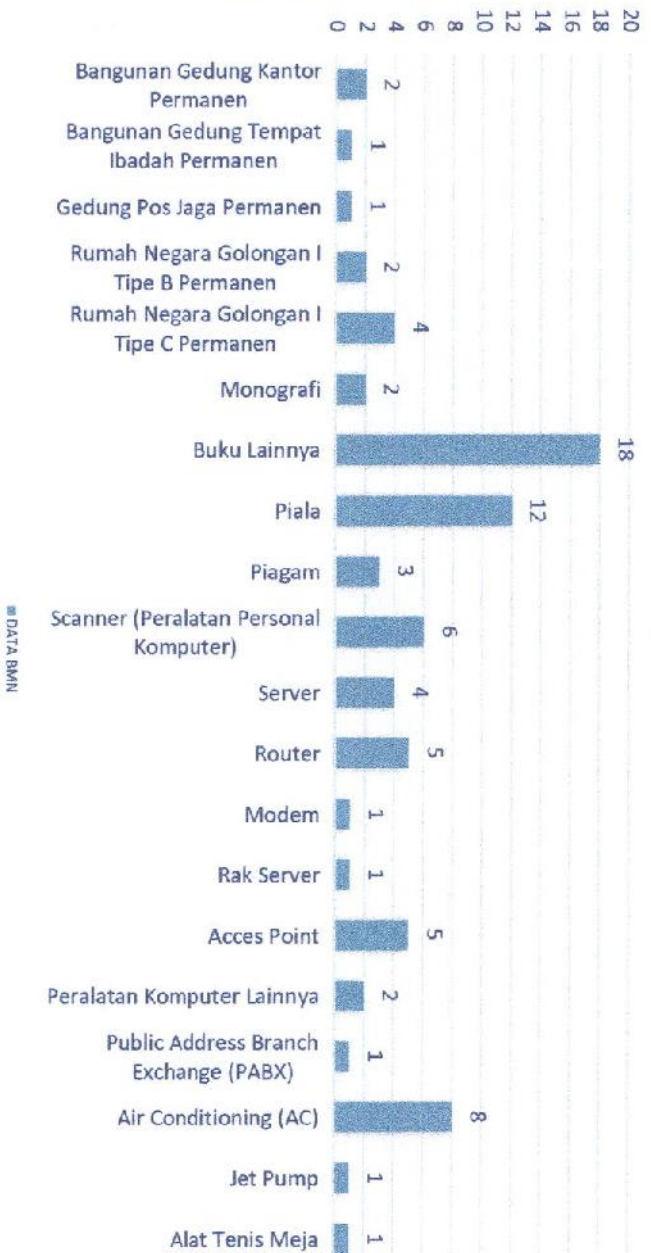


LAPORAN BILANAN PTUN JAKARTA

DATA BMN



DATA BMN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

4) Perpustakaan :

Untuk Bulan Mei 2025 Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.

b. Keuangan

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dan 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lab.	Periode Im	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	16.325.658.000	0	7.683.377.447	2.337.924.542	10.223.201.989	62,62 %	6.102.356.011
WA Program Dukungan Manajemen	16.325.658.000	0	7.683.377.447	2.337.924.542	10.223.201.989	62,62 %	6.102.356.011
WA 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	139.690.000	0	89.600.000	0	89.600.000	64,14 %	50.090.000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	139.690.000	0	89.600.000	0	89.600.000	64,14 %	50.090.000
EBB 901 Layanan Sarana Internal	139.690.000	0	89.600.000	0	89.600.000	64,14 %	50.090.000
027 Pengadaan peralatan/fasilitas perkantoran	139.690.000	0	89.600.000	0	89.600.000	64,14 %	50.090.000
003.0A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	139.690.000	0	89.600.000	0	89.600.000	64,14 %	50.090.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.690.000	0	89.600.000	0	89.600.000	64,14 %	50.090.000
000001 AC 2 PK	89.690.000	0	89.600.000	0	89.600.000	99,90 %	90.000
000002 Mesin Antiradi Sinar	50.000.000	0	0	0	0	0,00 %	50.000.000
WA 6086 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	16.185.968.000	0	7.790.777.447	2.337.924.542	10.133.701.989	62,61 %	6.052.266.011
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	16.185.968.000	0	7.790.777.447	2.337.924.542	10.133.701.989	62,61 %	6.051.966.011
EBA 992 Layanan Umum	700.000	0	0	0	0	0,00 %	700.000
001 Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700.000	0	0	0	0	0,00 %	700.000
001.0A Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakompabel	700.000	0	0	0	0	0,00 %	700.000
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakompabel	700.000	0	0	0	0	0,00 %	700.000
000005 Printer Hp Laserjet P1102	700.000	0	0	0	0	0,00 %	700.000
EBA 994 Layanan Perkantoran	10.164.968.000	0	7.790.777.447	2.337.924.542	10.133.701.989	62,61 %	6.051.266.011
001 Gaji dan Tunjangan	13.487.211.000	0	6.581.432.204	2.228.802.990	8.810.235.194	65,42 %	4.676.975.806
001.0A GAJI DAN TUNJANGAN	13.487.211.000	0	6.581.432.204	2.228.802.990	8.810.235.194	65,32 %	4.676.956.846
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	4.061.090.000	0	2.116.442.920	700.182.320	2.816.625.240	69,30 %	1.244.464.760
000003 Belanja Gaji Pokok PNS	3.345.749.000	0	1.769.120.600	348.219.760	2.117.339.500	63,08 %	1.228.414.500
000004 Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	357.973.000	0	347.322.120	0	347.322.120	97,02 %	10.650.880
000005 Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	357.973.000	0	0	351.968.620	351.968.620	98,32 %	6.004.380
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	61.000	0	28.967	8.723	34.720	56,92 %	26.280
000006 Belanja Pembulatan Gaji PNS	51.000	0	21.273	4.345	25.616	50,23 %	25.384

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
00007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	5.000	0	0	4.408	4.408	88.16 %	592
00008. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	5.000	0	4.056	0	4.056	81.12 %	304
511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS	370.204.000	0	196.571.556	51.853.246	208.424.802	56.29 %	161.779.198
00009. Belanja Tunjangan Suami/istri PNS	317.710.000	0	130.911.650	35.011.020	155.922.670	48.77 %	161.787.330
00010. Belanja Tunjangan Suami/istri PNS (Gaji ke 13)	26.247.000	0	0	26.042.226	26.042.226	99.22 %	204.774
00011. Belanja Tunjangan Suami/istri PNS (Gaji ke 14)	26.247.000	0	25.959.906	0	25.959.906	97.76 %	287.094
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	120.138.000	0	50.056.900	16.910.818	66.967.718	55.74 %	53.170.282
00012. Belanja Tunjangan Anak PNS	103.228.000	0	41.800.792	8.405.502	50.206.294	48.70 %	52.990.696
00013. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	6.455.000	0	0	8.444.266	8.444.266	99.87 %	10.734
00014. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	8.455.000	0	8.256.018	0	8.256.018	97.65 %	198.982
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	43.200.000	0	17.288.000	5.750.600	23.040.000	53.33 %	20.150.000
00015. Belanja Tunjangan Struktural PNS	37.440.000	0	14.400.000	2.880.000	17.280.000	46.19 %	20.150.000
00016. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	2.880.000	0	0	2.880.000	2.880.000	100.00 %	0
00017. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	2.880.000	0	2.880.000	0	2.880.000	100.00 %	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	888.942.000	0	673.310.000	26.850.000	699.960.000	78.75 %	188.882.000
00018. Belanja Tunj. Fungsional PNS	851.009.000	0	659.805.000	13.145.000	672.950.000	79.08 %	178.059.000
00019. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	21.000.000	0	0	13.205.000	13.205.000	64.31 %	7.495.000
00020. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	16.837.000	0	13.505.000	0	13.505.000	80.21 %	3.332.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	122.197.000	0	91.275.235	13.392.755	104.668.010	85.66 %	17.528.990
00021. Belanja Tunj. PPh PNS	98.434.000	0	78.723.093	1.83.812	78.906.905	81.62 %	17.527.095
00022. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	10.210.000	0	0	13.208.943	13.208.943	99.99 %	1.057
00023. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	12.553.000	0	12.552.162	0	12.552.162	99.99 %	838
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	257.525.000	0	108.830.000	33.920.320	144.550.320	56.13 %	112.974.680
00024. Belanja Tunj. Beras PNS	257.525.000	0	108.830.000	33.920.320	144.550.320	56.13 %	112.974.680
511129 Belanja Uang Makan PNS	1.001.611.800	0	182.422.000	50.072.000	232.494.000	23.21 %	769.117.800
00025. Gaji IV (29 org x 25 hr x 12 Bln)	340.013.000	0	82.533.000	23.328.000	105.862.000	31.13 %	234.151.000
00026. Gaji III (90 org x 22 Hr x 12 Bln)	559.958.000	0	91.279.000	24.013.000	115.292.000	20.59 %	444.666.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
00027. Gaji II (10 org x 22 Hr x 12 Bln)	32.400.000	0	6.580.000	2.240.000	8.820.000	9.35 %	83.580.000
00028. Gaji I (1 org x 22 Hr x 12 Bln)	3.240.000	0	2.050.000	490.000	2.520.000	27.27 %	6.720.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	84.854.000	0	28.770.800	8.590.000	38.360.000	45.21 %	46.494.000
00029. Belanja Tunjangan Umum PNS	63.845.000	0	23.975.000	4.799.000	28.774.000	45.06 %	35.071.000
00030. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	10.402.000	0	0	4.795.000	4.795.000	46.10 %	5.607.000
00031. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	10.402.000	0	4.795.800	0	4.795.000	46.07 %	5.612.000
511524 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1.147.329.000	0	403.059.986	249.375.150	712.435.116	62.09 %	434.903.884
000100. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	796.864.000	0	269.590.425	70.302.042	351.961.467	44.42 %	434.902.533
000101. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (gaji ke 13)	177.014.000	0	0	177.013.108	177.013.108	100.00 %	892
000102. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (gaji ke 14)	173.461.000	0	173.460.541	0	173.460.541	100.00 %	459
511530 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	5.327.600.000	0	2.072.100.000	1.062.208.000	3.734.308.000	70.09 %	1.593.292.000
000097. Belanja Tunjangan Pejabat Negara (gaji ke 13)	1.062.200.000	0	531.100.000	531.100.000	1.062.200.000	100.00 %	0
000098. Belanja Tunjangan Pejabat Negara (gaji ke 14)	522.190.000	0	522.100.000	0	522.100.000	100.00 %	0
000099. Belanja Tunjangan Pejabat Negara	3.743.200.000	0	1.018.900.000	531.100.000	2.150.800.000	57.44 %	1.593.200.000
511511 Belanja Gaji Pokok PPPK	39.860.000	0	17.152.800	5.717.600	22.870.400	57.35 %	16.989.600
000032. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2.859.000	0	2.858.800	0	2.858.800	99.99 %	200
000033. Belanja Gaji Pokok PPPK	33.882.000	0	14.294.000	2.858.800	17.152.800	50.93 %	16.729.200
000034. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2.859.000	0	0	2.858.800	2.858.800	99.99 %	200
511515 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000	0	420	148	568	8.11 %	6.432
000035. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.000	0	0	80	80	8.00 %	920
000036. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.000	0	80	0	80	8.00 %	920
000037. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000	0	340	68	408	8.16 %	4.592
511521 Belanja Tunjangan Suami/istri PPPK	3.704.000	0	0	0	0	0.00 %	3.704.000
000038. Belanja Tunjangan Suami/istri PPPK (gaji ke 13)	264.000	0	0	0	0	0.00 %	264.000
000039. Belanja Tunjangan Suami/istri PPPK	3.170.000	0	0	0	0	0.00 %	3.170.000
000040. Belanja Tunjangan Suami/istri PPPK (gaji ke 14)	264.000	0	0	0	0	0.00 %	264.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511022 Belanja Tunjangan Anak PPK	1.480.000	0	0	0	0	0,00%	1.480.000
000041. Belanja Tunjangan Anak PPK	1.270.000	0	0	0	0	0,00%	1.270.000
000042. Belanja Tunjangan Anak PPK (gaji ke 13)	105.000	0	0	0	0	0,00%	105.000
000043. Belanja Tunjangan Anak PPK (gaji ke 14)	105.000	0	0	0	0	0,00%	105.000
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPK	4.900.000	0	2.100.000	700.000	2.800.000	57,14%	2.100.000
000044. Belanja Tunjangan Fungsional PPK	4.200.000	0	1.730.000	330.000	2.100.000	50,00%	2.100.000
000045. Belanja Tunjangan Fungsional PPK (gaji ke 13)	350.000	0	0	350.000	350.000	100,00%	0
000046. Belanja Tunjangan Fungsional PPK (gaji ke 14)	350.000	0	350.000	0	350.000	100,00%	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPK	4.054.000	0	434.320	144.840	579.360	14,29%	3.474.640
000047. Belanja Tunjangan Beras PPK	3.476.000	0	362.100	72.420	434.520	12,50%	3.041.480
000048. Belanja Tunjangan Beras PPK (gaji ke 13)	289.000	0	0	72.420	72.420	25,06%	216.580
000049. Belanja Tunjangan Beras PPK (gaji ke 14)	289.000	0	72.420	0	72.420	25,06%	216.580
511628 Belanja Uang Makan PPK	6.400.000	0	1.820.000	325.000	2.345.000	36,64%	5.055.000
000050. Belanja Uang Makan PPK	6.400.000	0	1.820.000	325.000	2.345.000	36,64%	5.055.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.097.737.000	0	1.214.325.343	169.121.397	1.233.446.740	58,66%	1.374.310.260
002-0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	789.561.000	0	306.087.249	63.133.565	369.220.815	46,76%	420.330.185
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	789.561.000	0	306.087.249	63.133.565	369.220.815	46,76%	420.330.185
000051. Kebutuhan sehari-hari Perkantoran	26.474.000	0	12.574.175	4.434.565	17.008.741	64,25%	9.465.259
000052. Pramubakal (5 org x 12 bulan)	367.488.000	0	122.490.000	30.624.000	153.114.000	41,67%	214.368.000
000053. Saji (5 org x 12 Bln)	330.900.000	0	112.528.074	28.075.000	140.603.074	41,67%	190.296.926
000054. THR Pramubakal 6 Org X 1 Bln)	30.624.000	0	30.624.000	0	30.624.000	100,00%	0
000055. THR Saji (5 org X 1 bln)	28.075.000	0	28.075.000	0	28.075.000	100,00%	0
002-0B LANGGANAN DAYA, JASA	236.400.000	0	219.292.884	567.430	219.860.314	92,83%	17.539.686
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	190.608.000	0	190.784.336	0	190.784.336	97,94%	3.819.664
000056. Langganan Internet	190.000.000	0	189.950.000	0	189.950.000	99,99%	40.000
000057. Lisensi Video Conference	6.600.000	0	624.336	0	624.336	9,46%	5.975.664
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Paket	4.800.000	0	191.000	257.000	448.000	9,33%	4.352.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000058. Biaya Pengiriman Surat Dinas	4.800.000	0	191.000	257.000	448.000	9,33%	4.352.000
521112 Belanja Langganan Telepon	6.000.000	0	1.337.548	330.450	1.667.998	27,80%	4.332.002
000059. Langganan Telepon	6.000.000	0	1.337.548	330.450	1.667.998	27,80%	4.332.002
521113 Belanja Langganan Air	3.000.000	0	0	0	0	0,00%	3.000.000
000060. Langganan Air	3.000.000	0	0	0	0	0,00%	3.000.000
521141 Belanja Sewa	26.000.000	0	25.980.000	0	25.980.000	99,92%	20.000
000061. Langganan Web-Hosting	26.000.000	0	25.980.000	0	25.980.000	99,92%	20.000
002-0C Pemeliharaan Kantor	536.832.000	0	264.824.610	42.242.576	307.067.186	57,21%	229.764.814
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189.852.000	0	132.540.669	29.781.940	162.322.609	85,50%	27.529.391
000062. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan	189.852.000	0	132.540.669	29.781.940	162.322.609	85,50%	27.529.391
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45.000.000	0	0	0	0	0,00%	45.000.000
000063. Pemeliharaan Rumah Dinas (4 Unit)	45.000.000	0	0	0	0	0,00%	45.000.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	302.100.000	0	132.283.950	12.460.636	144.744.586	47,91%	157.355.414
000064. Pemeliharaan Lift	60.000.000	0	54.293.000	0	54.293.000	90,65%	5.707.000
000065. Bensin Mobil Sewa Ketsua	20.000.000	0	7.200.000	1.578.025	8.778.025	43,89%	11.221.975
000066. Pemeliharaan AC Cassete	30.000.000	0	29.257.800	0	29.257.800	97,52%	742.200
000067. Pemeliharaan Laptop	14.000.000	0	1.380.000	0	1.380.000	9,86%	12.620.000
000068. Pemeliharaan PC	31.390.000	0	0	0	0	0,00%	31.390.000
000069. Pemeliharaan Printer	20.700.000	0	0	0	0	0,00%	20.700.000
000070. Pemeliharaan AC Split	28.000.000	0	23.359.950	0	23.359.950	83,43%	4.640.050
000071. Pemeliharaan Mesin Pompa	7.350.000	0	0	6.909.000	6.909.000	93,88%	450.000
000072. Kendaraan Roda 2	14.000.000	0	0	281.900	281.900	2,01%	13.718.100
000073. Kendaraan Roda 4	76.000.000	0	16.816.700	3.760.111	20.576.811	27,07%	55.423.189
002-0D Operasional Lainnya	239.914.000	0	31.620.500	3.158.900	34.779.400	14,50%	205.134.600
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	90.904.000	0	0	0	0	0,00%	90.904.000
000074. Pakian Dinas Pramubakal	4.428.000	0	0	0	0	0,00%	4.428.000
000075. Pakian Dinas Hakim 26 Org	21.788.000	0	0	0	0	0,00%	21.788.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000076. Pakatan Dinas Pegawai 90 Org	57.984.000	0	0	0	0	0,00%	57.984.000
000077. Pakatan Dinas CPNS 2 Org	1.676.000	0	0	0	0	0,00%	1.676.000
000078. Pakatan Dinas PPPK 1 Org	838.000	0	0	0	0	0,00%	838.000
000079. Pakatan Dinas Satpam	4.190.000	0	0	0	0	0,00%	4.190.000
521115. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80.700.000	0	18.720.000	0	18.720.000	23,18%	62.980.000
000080. Honor PPA&P	5.880.000	0	0	0	0	0,00%	5.880.000
000081. Honor KPA	21.500.000	0	5.400.000	0	5.400.000	25,00%	16.200.000
000082. Honor PPK	21.000.000	0	5.250.000	0	5.250.000	25,00%	15.750.000
000083. Honor Penguji Tagihan Penambatanngan SPM	9.000.000	0	2.250.000	0	2.250.000	25,00%	6.750.000
000084. Honor Bendahara Persewaan	3.500.000	0	900.000	0	900.000	25,00%	2.700.000
000085. Honor Bendahara Pengeluaran	7.920.000	0	1.980.000	0	1.980.000	25,00%	5.940.000
000086. Honor Staf Keuangan (2 org x 12 Bln)	11.760.000	0	2.940.000	0	2.940.000	25,00%	8.820.000
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	68.250.000	0	12.900.000	3.158.000	16.058.000	23,53%	52.191.500
000087. Biaya perkantoran sehari hari (91 Org)	68.250.000	0	12.900.000	3.158.000	16.058.000	23,53%	52.191.500
002.00 Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding	23.325.000	0	0	0	0	0,00%	23.325.000
524111. Belanja Perjalanan Dinas Busa	22.200.000	0	0	0	0	0,00%	22.200.000
000088. Transportasi (2 org x 3 kegiatan)	2.700.000	0	0	0	0	0,00%	2.700.000
000089. Uang Makan (2 org x 3 hari x 3 kegiatan)	4.950.000	0	0	0	0	0,00%	4.950.000
000090. Tiket (2 org x 2 hari x 3 kegiatan)	5.250.000	0	0	0	0	0,00%	5.250.000
000091. Penginapan (2 org x 2 hari x 3 kegiatan)	5.300.000	0	0	0	0	0,00%	5.300.000
524113. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.125.000	0	0	0	0	0,00%	1.125.000
000092. Perjalanan Dinas Dalam Kota (3 Org x 5 keg)	1.125.000	0	0	0	0	0,00%	1.125.000
002.04 Konsultasi ke KPPI/KANWIL DJPb/KPKJK/KANWIL DJKN/BN-BSK	1.125.000	0	0	0	0	0,00%	1.125.000
524113. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.125.000	0	0	0	0	0,00%	1.125.000
000093. Perjalanan Dinas Dalam Kota (3 Org x 5 keg)	1.125.000	0	0	0	0	0,00%	1.125.000
002.01 Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	870.480.000	0	393.390.000	0	393.390.000	45,19%	477.090.000
522141. Belanja Sewa	870.480.000	0	393.390.000	0	393.390.000	45,19%	477.090.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000094. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (20 Orang x 12 Bln)	870.480.000	0	393.390.000	0	393.390.000	45,19%	477.090.000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	0	0	0	0	0,00%	300.000
EBD 850 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	0	0	0,00%	300.000
051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	0	0	0,00%	300.000
051.0A Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	0	0	0,00%	300.000
521211. Belanja Bahan	300.000	0	0	0	0	0,00%	300.000
000098. Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	0	0	0,00%	300.000

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025 Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; Subkomponen; Akun; Item; Periode Mei 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	81.750.000	0	14.805.000	3.480.000	18.285.000	22,37 %	63.465.000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	81.750.000	0	14.805.000	3.480.000	18.285.000	22,37 %	63.465.000
BF.1050 Penegakan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	81.750.000	0	14.805.000	3.480.000	18.285.000	22,37 %	63.465.000
AEA Keandaraan	30.000.000	0	7.200.000	1.080.000	8.280.000	27,60 %	21.720.000
AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	30.000.000	0	7.200.000	1.080.000	8.280.000	27,60 %	21.720.000
001 Pelaksanaan Pengiriman Surat	30.000.000	0	7.200.000	1.080.000	8.280.000	27,60 %	21.720.000
001.0A Pelaksanaan	30.000.000	0	7.200.000	1.080.000	8.280.000	27,60 %	21.720.000
521211 Belanja Bahan	30.000.000	0	7.200.000	1.080.000	8.280.000	27,60 %	21.720.000
000001. Konsumsi Pengamanan Sidang (20 org x 30 kali)	30.000.000	0	7.200.000	1.080.000	8.280.000	27,60 %	21.720.000
BGA Perkara Hukum Perseroan	1.000.000	0	405.000	0	405.000	38,21 %	605.000
BGA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diserahkan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.000.000	0	405.000	0	405.000	38,21 %	605.000
001 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	1.000.000	0	405.000	0	405.000	38,21 %	605.000
001.0A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	405.000	0	405.000	0	405.000	100,00 %	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180.000	0	180.000	0	180.000	100,00 %	0
000002. Pengiriman Penerimaan Penggajian	180.000	0	180.000	0	180.000	100,00 %	0
521211 Belanja Bahan	225.000	0	225.000	0	225.000	100,00 %	0
000003. Pengadaan dan Pengiriman Berkas Perkara	100.000	0	100.000	0	100.000	100,00 %	0
000004. Alat Tulis Kantor	125.000	0	125.000	0	125.000	100,00 %	0
001.0B Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	555.000	0	0	0	0	0,00 %	555.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180.000	0	0	0	0	0,00 %	180.000
000005. Pengiriman Penerimaan Penggajian	180.000	0	0	0	0	0,00 %	180.000
521211 Belanja Bahan	225.000	0	0	0	0	0,00 %	225.000
000006. Pengadaan dan Pengiriman Berkas Perkara	100.000	0	0	0	0	0,00 %	100.000
000007. Alat Tulis Kantor	125.000	0	0	0	0	0,00 %	125.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	250.000	0	0	0	0	0,00 %	250.000
000008. Biaya Pemeliharaan Banding diantar ke PTUN	250.000	0	0	0	0	0,00 %	250.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
OBA Layanan Bantuan Hukum Perseroan	33.000.000	0	7.200.000	2.400.000	9.600.000	29,09 %	23.400.000
OBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33.000.000	0	7.200.000	2.400.000	9.600.000	29,09 %	23.400.000
001 Pos Bantuan Hukum	33.000.000	0	7.200.000	2.400.000	9.600.000	29,09 %	23.400.000
001.0A tanpa sub-komponen	33.000.000	0	7.200.000	2.400.000	9.600.000	29,09 %	23.400.000
521211 Belanja Bahan	4.200.000	0	0	0	0	0,00 %	4.200.000
000009. ATK Layanan Pos Bantuan Hukum	4.200.000	0	0	0	0	0,00 %	4.200.000
522101 Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000	0	7.200.000	2.400.000	9.600.000	33,33 %	19.200.000
000010. Jasa Layanan Konsultansi Hukum (3 Jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 Bn)	28.800.000	0	7.200.000	2.400.000	9.600.000	33,33 %	19.200.000
OCA Perkara Hukum Perseroan	17.690.000	0	0	0	0	0,00 %	17.690.000
OCA.002 Perkara yang diayahi melalui sidang di luar gedung lingkungan peradilan Tata Usaha Negara	17.690.000	0	0	0	0	0,00 %	17.690.000
001 Sidang di luar Gedung Pengadilan	17.690.000	0	0	0	0	0,00 %	17.690.000
001.0A TANPA SUB-KOMPONEN	17.690.000	0	0	0	0	0,00 %	17.690.000
522101 Belanja Jasa Lainnya	300.000	0	0	0	0	0,00 %	300.000
000011. Biaya Uang Keberatan (3 Orang x 1 Kali)	300.000	0	0	0	0	0,00 %	300.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.390.000	0	0	0	0	0,00 %	17.390.000
000012. Transportasi 7 Org x 1 Keg	2.100.000	0	0	0	0	0,00 %	2.100.000
000013. Tikel 7 Org x 1 Keg	4.636.000	0	0	0	0	0,00 %	4.636.000
000014. Biaya Pengiriman Perjalanan Dinas (7 Orang x 1 Malam x 1 Keg)	6.944.000	0	0	0	0	0,00 %	6.944.000
000015. Uang Harian (7 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan)	3.710.000	0	0	0	0	0,00 %	3.710.000

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan Mei 2025 agenda rapat meliputi :

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan seluruh Pegawai agar dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara profesional dengan tetap berpegang teguh dan berpedoman pada KEPPH, Kode Etik Kepaniteraan, Kode Etik ASN dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa semenjak Tim Satgas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan pemeriksaan rutin secara langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait penegakan disiplin pegawai, tingkat kedisiplinan Hakim dan Pegawai semakin membaik dan hal tersebut harus lebih ditingkatkan lagi terutama pada saat tim Satgas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tidak hadir secara langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena hingga saat ini berdasarkan pada laporan penegakan disiplin yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta setiap bulannya, masih terdapat beberapa Hakim dan Pegawai yang perlu meningkatkan kembali kedisiplinannya oleh karena itu disampaikan kepada setiap atasan langsung untuk harus selalu memantau dan mengawasi bawahannya.
- Menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Satgas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah bersurat kepada Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI agar dilakukan penguncian titik koordinat kantor terkait presensi online pada aplikasi SIKEP sehingga Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak dapat melakukan presensi online di luar titik koordinat kantor yang telah ditentukan.

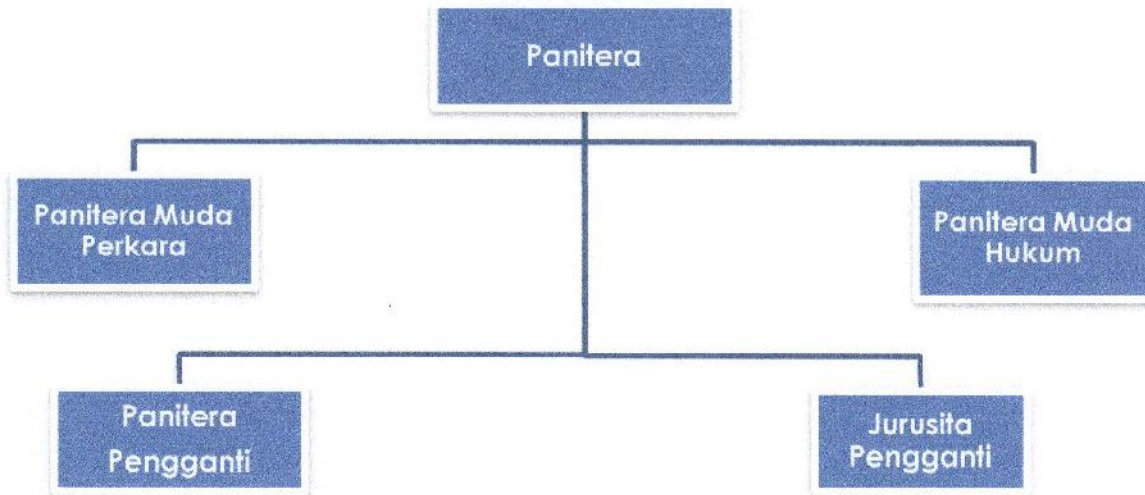
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Berkaitan dengan penegakan disiplin dan kehadiran Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengingatkan kembali bahwa Izin Tidak Masuk Kerja hanya diperbolehkan 2 hari dalam 1 tahun dan tidak berlaku bagi pegawai non Hakim.
 - Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan melakukan Pembinaan dan Pengawasan pada tanggal 22-23 Mei 2025, oleh karena itu diinstruksikan kepada Panitera dan Sekretaris untuk segera menyelesaikan atau merapikan hal-hal yang harus diselesaikan sebagaimana mestinya.
 - Ibu Oenoen Pratiwi, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa walaupun PTUN Jakarta telah memperoleh predikat paripurna pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) namun kegiatan SMAP tetap harus berjalan sebagaimana mestinya dan kepada seluruh Hakim dan Pegawai agar selalu mempelajari, memahami, dan mempedomani hal-hal yang berkaitan dengan SMAP.
 - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan apresiasi kepada seluruh Hakim dan Pegawai yang telah saling bekerja sama dalam pemenuhan eviden Wilayah Birokrasi Bersih Melayanai (WBBM) sehingga eviden-eviden tersebut telah terpenuhi dan selesai tepat pada waktunya.
 - Berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan kepada bagian kesekretariatan agar menyamakan format SOP dengan yang dikeluarkan oleh Dirjen Badimiltun Mahkamah Agung RI, dan kepada tim review SOP agar segera melakukan review SOP termasuk di bagian teknis, apabila terdapat SOP yang belum terakomodir oleh Dirjen Badimiltun agar segera dibuatkan dan disesuaikan dengan kondisi kantor PTUN Jakarta. Untuk tim Review SOP agar segera melakukan review SOP bagian Kesekretariatan terlebih dahulu melihat bahwa SOP bagian kesekretariatan telah siap untuk dilakukan review.
- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.

B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparaturnya yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

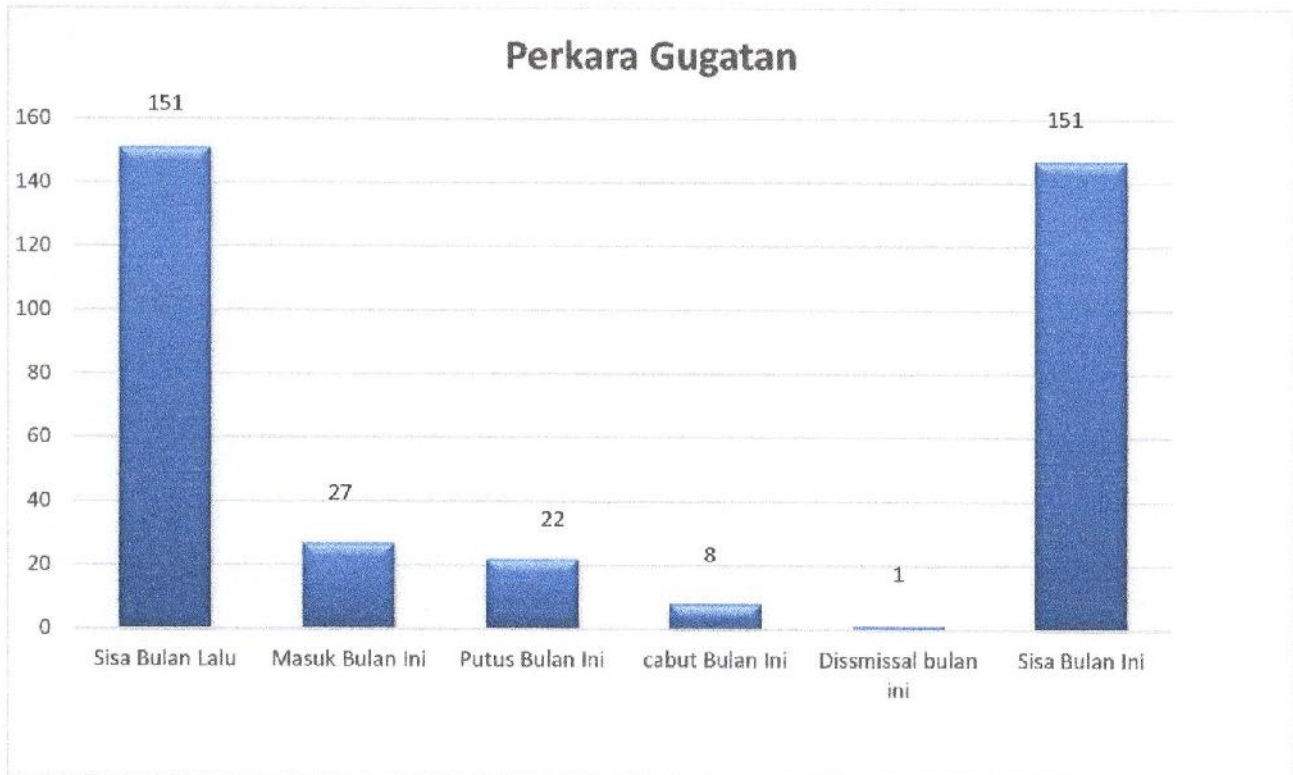
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.
- Membuat jurnal keuangan perkara.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2023.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2024

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

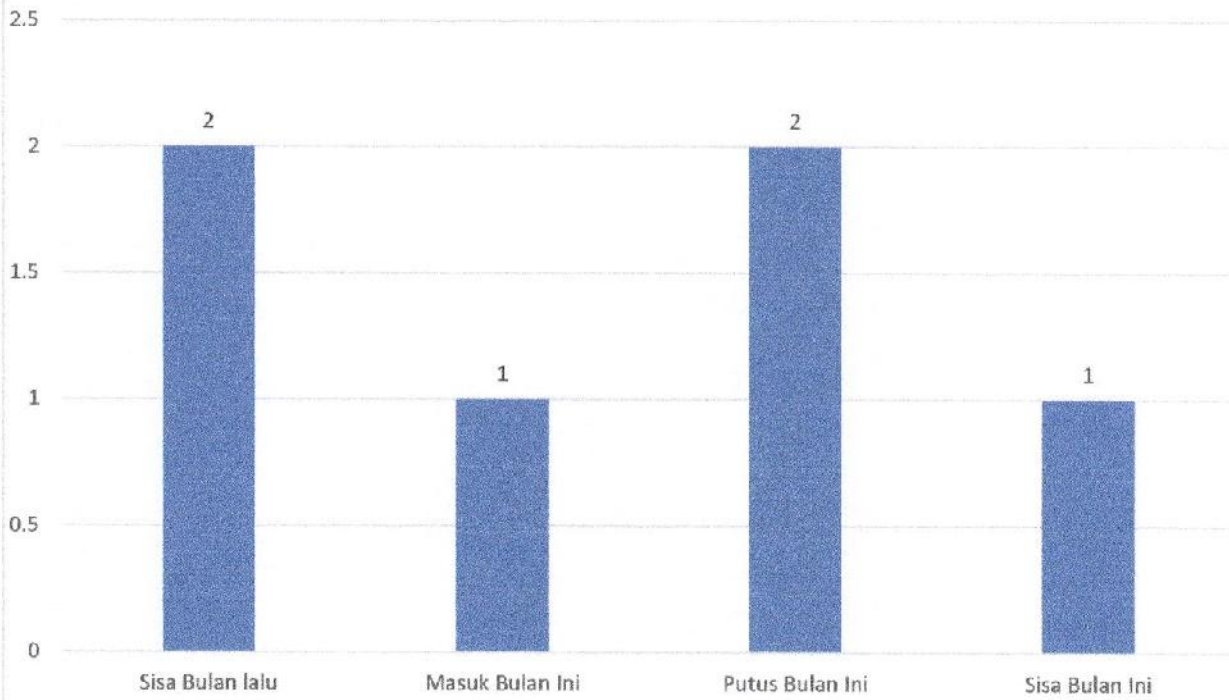
Keadaan Perkara



Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)
 $8 + 1 + 22 = 31$ Perkara

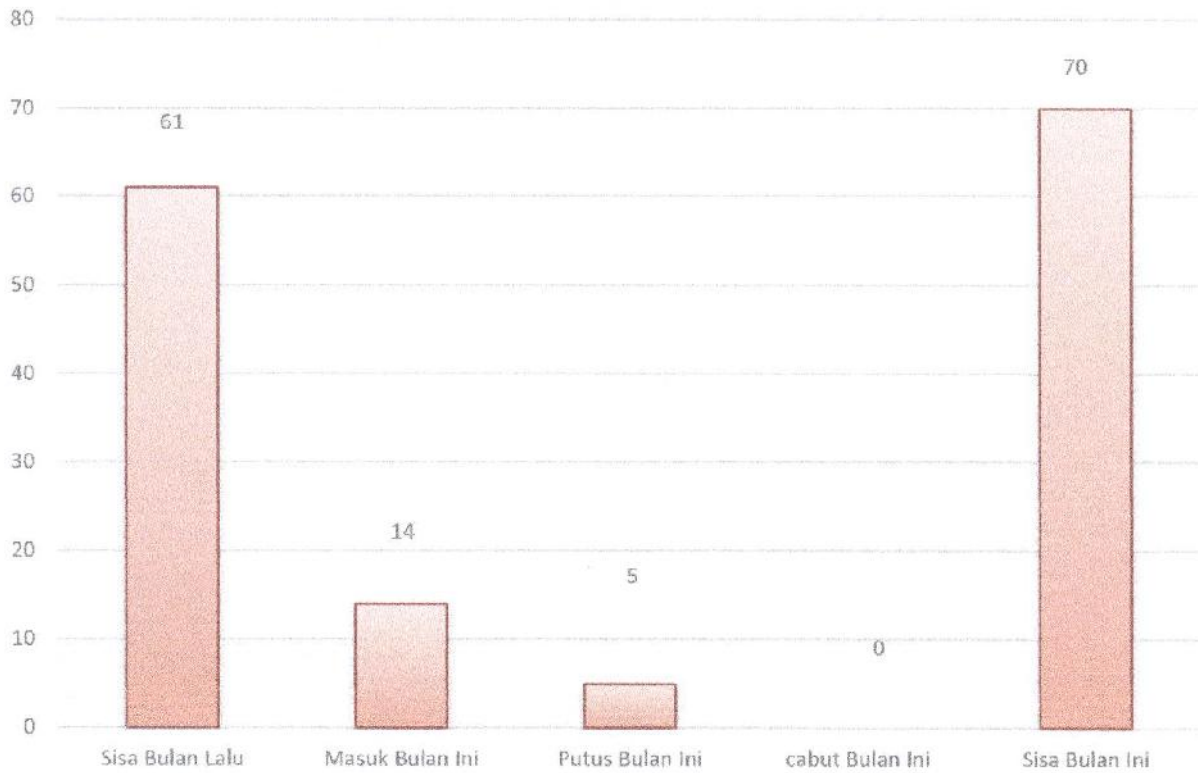
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Perlawanan

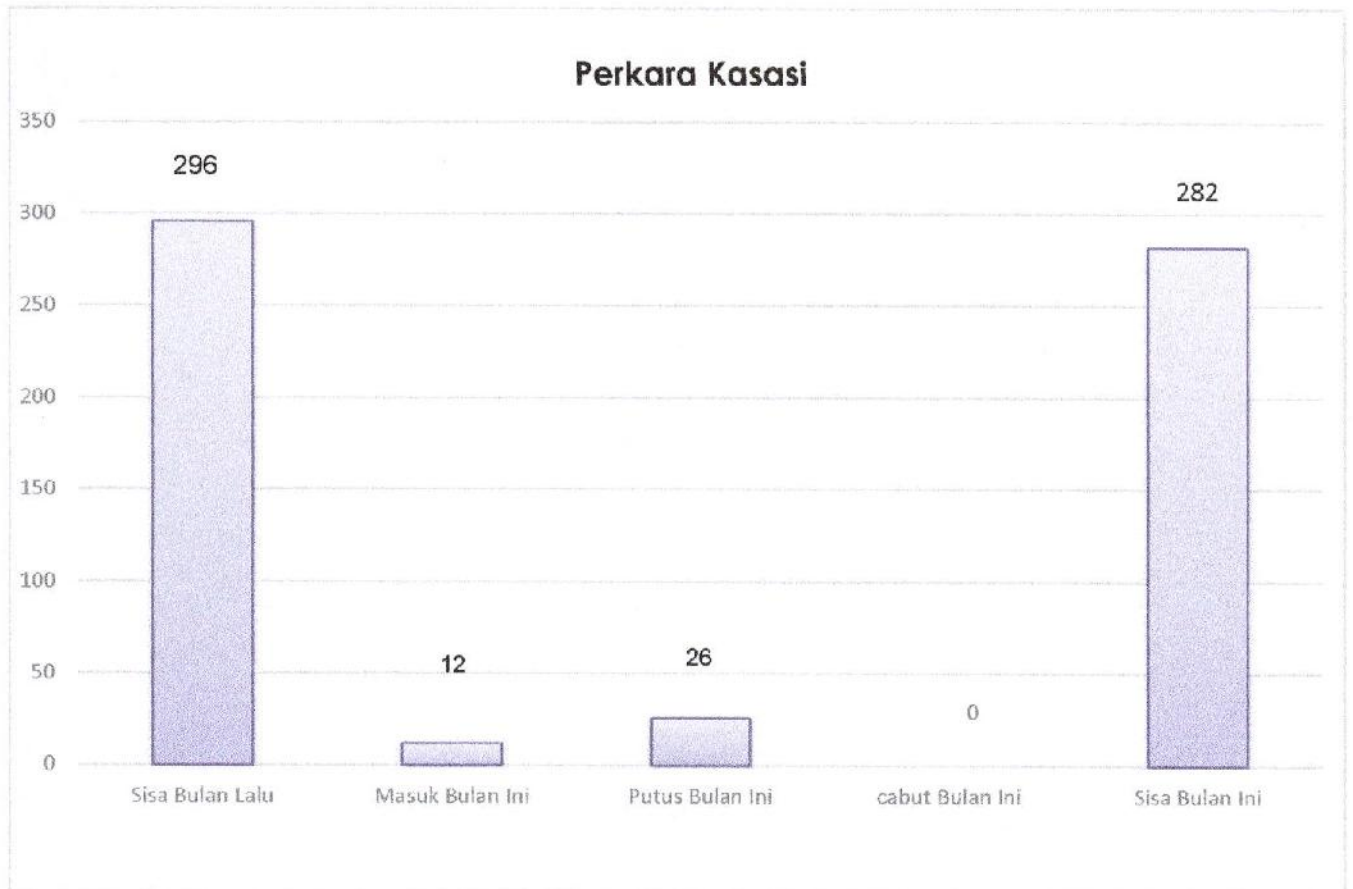


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Banding



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan Mei 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
 Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 BULAN MEI TAHUN 2025

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Perkara			Pengaduan			Tenggadit			Perlawanan			Putusan			Pemohonan			Terima Berkas		Keterangan					
			Masih	Ditutup	Jumlah	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan	Keputusan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
A GUGATAN																												
1	Pertanahan	16	2	-	18	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	16	3	-	1	1	-	2	-	(1 Masuk Perkara PLW)
2	Kepegawaian	16	5	-	21	5	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	19	1	-	-	-	-	1	-	(2 Putus Perkara PLW)	
3	Perjanjian	24	5	1	28	-	5	5	-	-	-	-	-	2	1	2	2	7	21	3	2	2	-	1	4	2		
4	Lingkungan Hidup	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Sidan Hukum/Perpol	35	4	-	39	1	3	4	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	4	35	1	1	-	1	1	2	-	
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pengantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Ketengakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Fikst Pooif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	12	1	-	13	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	10	3	7	11	-	3	16	2	
17	Menik	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
18	Lain Lain	43	10	1	52	9	1	6	4	-	1	-	-	1	-	6	1	9	43	3	-	-	-	-	1	-		
JUMLAH		151	27	2	176	18	9	20	7	1	2	-	-	6	1	14	5	29	147	14	12	14	2	5	26	4		

MENGETAHUI
 KETUA PTUN JAKARTA



OENOE PRATIWI, SH., MH
 NIP. 1972 10 26 1992 03 2001

Jakarta, 28 MEI 2025
 PANITERA

Dr. MUHAMMAD, SH., MH
 NIP. 196905201992031004

- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Mei 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
 Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 BULAN MEI TAHUN 2025

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 28 MEI 2025
 KETUA PTUN JAKARTA



OENOE PRATIWI, SH., MH
 NIP. 19721026 1992 03 2001

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

C. KEGIATAN LAIN – LAIN

Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimulai pukul 07.30 WIB dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Ibu **Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.**, serta di ikuti oleh segenap peserta upacara yang terdiri dari Wakil Ketua, Hakim, Pegawai, Cakim dan PPNPN Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 Tahun 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selesai pada pukul 08.00 WIB setelah seluruh rangkaian upacara tersebut ditutup dengan sesi doa bersama. Secara keseluruhan Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berjalan tertib, lancar dan penuh khidmat.



BAB III

TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 87 ASN, 11 PPNPN, dan 1 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 4 (empat) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB IV

KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan Mei 2025 berjalan dengan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran untuk renovasi rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).

Jakarta, 13 Juni 2025



Mengetahui


Ketua,

Pratiwi, SH, MH
NIP. 197210261992032001

Sekretaris,







Giri Wahyu Utomo, S.Kom
NIP. 198403262009041004

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta







No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh.• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaiki dengan rekonstruksi.





Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
		
		
		
		
		



Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Komponen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,• Komponen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.
		

KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat 	2	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan 	4	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	6	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	8	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					